KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2025

BPKPD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

jln. Imam Bonjol, No 36 Tarempa

bpkpd.anambas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 ini.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Selain itu melalui hasil review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja pada setiap bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang disertai dengan kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan lembaga terkait berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025.

Akhir kata, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini semoga dapat menghasilkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas secara optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua, Aamiin..., Berbagai kelemahan yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ini akan dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tarempa, 22 Juli 2024

KEPALA BADAN,

RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19701122 200212 1 003

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
BAB I.	Pendahuluan	1
I.1	Latar Belakang	1
I.2	Landasan Hukum	2
I.3	Maksud dan Tujuan	7
I.4	Sistematika Penulis	8
BAB II.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	10
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	29
II.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
II.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
II.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	72
BAB III.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	73
III.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	73
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	73
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	77
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	85
BAB V.	Penutup	111

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Derah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait. Rencana Kerja (Renja) dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD);
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan Perangkat Daerah untuk menyusun program kegiatan sebagaimana tindaklanjut dalam KUA dan PPAS dan perencanaan penganggaran program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui:

1. Program dan kegiatan BPKPD Tahun 2025;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD Tahun 2025;
3. Indikator kinerja BPKPD Tahun 2025;
4. Kelompok sasaran BPKPD Tahun 2025;
5. Pagu indikatif program dan kegiatan BPKPD Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsitensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengevaluasi Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun sebelumnya;

4. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi BPKPD Tahun sebelumnya;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
6. Perumusan tujuan dan sasaran BPKPD Tahun 2025;

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja), landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja), maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja).

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun lalu dan capaian Rencana Strategis (Renstra) OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024).

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahKabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025, diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2023 sejumlah Rp.229.698.130.062,00 (Dua ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu enam puluh dua rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp.141.966.123.759,00 (Seratus empat puluh satu

milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 61,81%.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator yaitu Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat BPKPD dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 92,80%. Anggaran Program ini sebesar Rp.25.496.180.247,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.659.830.486,00. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp.4.360.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.800.000,00 atau 64,22% dengan output Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp.18.459.336.647,00 terealisasi sebesar Rp.16.985.729.993,00 atau 92,02% dengan output Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp.243.000000,00 terealisasi sebesar Rp.156.300.000,00 atau 64,32% dengan output Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari rencana anggaran Rp.672.868.900,00 terealisasi sebesar Rp.594.208.666,00 atau 88,31% dengan output Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah dari rencana anggaran Rp.276.886.480,00 terealisasi sebesar Rp.209.550.240,00 atau 75,68% dengan output Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran Rp.673.620.720,00 terealisasi sebesar Rp.5.596.473.537,00 atau 98,64% dengan output Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerahsebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari rencana anggaran Rp.166.107.500,00 terealisasi sebesar Rp.114.768.050,00 atau 69,09% dengan output Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Persentase Silpa terhadap APBD. Program ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 57,73%. Anggaran program ini sebesar Rp.201.183.485.415,00 dengan realisasi sebesar Rp.116.149.188.347,00. Program Pengelolaan

Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran dari rencana anggaran Rp.2.936.381.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.812.554.788,00 atau 61,73% dengan output Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dari rencana anggaran Rp.441.423.860,00 terealisasi sebesar Rp.429.938.162,00 atau 97,40% dengan output Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp.1.267.005.600,00 terealisasi sebesar Rp.996.302.128,00 atau 78,63% dengan output Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp.195.494.939.955,00 terealisasi sebesar Rp.112.145.272.319,00 atau 57,36% dengan output Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dari rencana anggaran Rp.1.043.735.000,00 terealisasi sebesar Rp.765.120.950,00 atau 73,31% dengan output Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah sebesar 100% selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Cakupan pengelolaan asset daerah. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 79,98%. Anggaran program ini sebesar Rp.2.088.083.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.670.031.824,00. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran Rp.2.088.083.600,00 terealisasi sebesar Rp.1.670.031.824,00 atau 79,98% dengan output Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100% terealisasi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

IV. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan indikator yaitu Persentase tingkat pertumbuhan PAD. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan target program 100% namun hanya terealisasi sebesar 52,35%. Anggaran program ini sebesar Rp.930.380.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.487.073.102,00. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari rencana anggaran Rp.930.380.800,00 terealisasi sebesar Rp.487.073.102,00 atau 52,35% dengan output Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 100% terealisasi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

Adapun realisasi fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel II.1 Realisasi Fisik dan Keuangan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN				
			KEUANGAN			FISIK	
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN	
			Rp	%	TERTIMBANG S/D BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BULAN LAPORAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.496.180.247**	**23.659.830.486**	**92,80**	**10,30**		**11,08**
1	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**4.360.000**	**2.800.000**	**64,22**	**0,00**		**0,00**
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.720.000	2.400.000	64,52	0,00	100,00	0,00
2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	640.000	400.000	62,50	0,00	100,00	0,00
2	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**18.459.336.647**	**16.985.729.993**	**92,02**	**7,39**		**8,04**
3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	17.616.182.647	16.150.539.993	91,68	7,03	100,00	7,67

4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	840.120.000	834.000.000	99,27	0,36	100,00	0,37
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.034.000,00	1.190.000,00	39,22	0,00	100,00	0,00
3	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**243.000.000**	**156.300.000**	**64,32**	**0,07**		**0,10**
6	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	243.000.000	156.300.000	64,32	0,07	94,17	0,10
4	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**672.868.900**	**594.208.666**	**88,31**	**0,26**		**0,29**
7	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	33.755.000	18.744.000	55,53	0,01	89,22	0,01
8	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	102.499.900	64.941.400	63,36	0,03	100,00	0,04
9	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100.502.000	93.529.800	93,06	0,04	100,00	0,04
10	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
11	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	42.000.000	41.940.000	99,86	0,02	100,00	0,02
12	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	391.712.000	375.053.466	95,75	0,16	100,00	0,17
5	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**276.886.480**	**209.550.240**	**75,68**	**0,09**		**0,11**

13	PENGADAAN KENDERAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDERAAN DINAS JABATAN	61.408.600	0	0,00	0,00	66,67	0,02
14	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	215.477.880	209.550.240	97,25	0,09	100,00	0,09
6	**PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.673.620.720**	**5.596.473.537**	**98,64**	**2,44**		**2,47**
15	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	97.490.780	83.098.560	85,24	0,04	100,00	0,04
16	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	124.747.900	109.032.300	87,40	0,05	100,00	0,05
17	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.451.382.040	5.404.342.677	99,14	2,35	100,00	2,37
7	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHN DAERAH**	**166.107.500**	**114.768.050**	**69,09**	**0,05**		**0,07**
18	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	76.907.500	48.684.350	63,30	0,02	100,00	0,03
19	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.520.000	29.081.500	63,89	0,01	100,00	0,02
20	PEMELIHARAAN / REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	43.680.000	37.002.200	84,71	0,02	100,00	0,02

II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**201.183.485.415**	**116.149.188.347**	**57,73**	**50,57**		**77,57**
8	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**	**2.936.381.000**	**1.812.554.788**	**61,73**	**0,79**		**1,28**
21	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	62.966.000	19.536.000	31,03	0,01	100,00	0,03
22	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	57.821.000	0	0,00	0,00	100,00	0,03
23	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	21.500.000	0	0,00	0,00	100,00	0,01
24	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	21.500.000	0	0,00	0,00	100,00	0,01
25	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	44.024.000	34.909.500	79,30	0,02	100,00	0,02
26	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	44.024.000	0	0,00	0,00	100,00	0,02
27	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	700.482.500	670.474.950	95,72	0,29	100,00	0,30
28	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG	666.898.500	453.821.900	68,05	0,20	100,00	0,29

	PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD						
29	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	363.210.000	226.498.800	62,36	0,10	100,00	0,16
30	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	314.327.000	177.285.538	56,40	0,08	100,00	0,14
31	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	183.035.000	168.751.600	92,20	0,07	100,00	0,08
32	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN	44.400.000	0	0,00	0,00	100,00	0,02
33	PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	412.193.000	61.276.500	14,87	0,03	100,00	0,18
9	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**	**441.423.860**	**429.938.162**	**97,40**	**0,19**		**0,19**
34	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	160.490.000	159.008.082	99,08	0,07	100,00	0,07
35	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	280.933.860	270.930.080	96,44	0,12	100,00	0,12

10	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**	**1.267.005.600**	**996.302.128**	**78,63**	**0,43**		**0,54**
36	REKONSILIASI DAN VERIVIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	129.537.000	103.800.000	80,13	0,05	100,00	0,06
37	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN	25.923.100	0	0,00	0,00	100,00	0,01
38	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	548.786.300	498.854.400	90,90	0,22	100,00	0,24
39	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	359.066.900	245.195.300	68,29	0,11	95,76	0,15
40	PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	13.770.500	0	0,00	0,00	100,00	0,01

	TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD						
41	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	105.461.000	99.233.628	94,10	0,04	100,00	0,05
42	PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	15.431.800	0	0,00	0,00	100,00	0,01
43	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	66.783.000	49.218.800	73,70	0,02	100,00	0,03
44	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	2.246.000	0	0,00	0,00	100,00	0,00
11	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**195.494.939.955**	**112.145.272.319**	**57,36**	**48,82**		**75,13**
45	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	68.799.839.255	0	0,00	0,00	66,67	19,97
46	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	126.695.100.700	112.145.272.319	88,52	48,82	100,00	55,16

13	**PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH**	**1.043.735.000**	**765.120.950**	**73,31**	**0,33**		**0,43**
47	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	1.043.735.000	765.120.950	73,31	0,33	94,47	0,43
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.088.083.600**	**1.670.031.824**	**79,98**	**0,73**		**0,91**
13	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**2.088.083.600**	**1.670.031.824**	**79,98**	**0,73**		**0,91**
48	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	901.105.700	686.918.164	76,23	0,30	100,00	0,39
49	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.186.977.900	983.113.660	82,82	0,43	100,00	0,52
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**930.380.800**	**487.073.102**	**52,35**	**0,21**	**99,67**	**0,40**
14	**PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**930.380.800**	**487.073.102**	**52,35**	**0,21**	**99,67**	**0,40**
50	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	336.918.000	217.167.252	64,46	0,09	100,00	0,15

51	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	129.626.200	100.800.400	77,76	0,04	98,37	0,06
52	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	148.230.700	69.619.200	46,97	0,03	100,00	0,06
53	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	165.953.900	13.253.750	7,99	0,01	100,00	0,07
54	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	149.652.000	86.232.500	57,62	0,04	100,00	0,07
	JUMLAH	**229.698.130.062**	**141.966.123.759**		**61,81**		**89,97**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja pada Review Renstra Tahun 2021-2023 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

Tabel II.2 Capaian Hasil Indikator Kinerja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	Formulasi	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2026
Penunjang Urusan												
Semua Bidang												
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (61)	B (63)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)	B (63,39)	B (63,46)	-	BB (71)
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	BB (80)	BB (80,05)	A (80,30)	A (80,60)	A (81,00)	A (81,50)	BB (79,10)	BB (74,71)	BB (71,86)	A (81,50)
Bidang Perbendaharaan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan												
3	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Anggaran												
4	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P tahun berjalan yang disusun tepat waktu/Jumlah	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)

		Dokumen yang harus disusun tepat waktu*100%										
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah												
5	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah												
6	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan *100%	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	2,55%	3,40%	2,53%	6 %

Dari Tabel II.3 Capaian Hasil Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.
2. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar A (80,30) namun hanya terealisasi sebesar BB (71,86), hal ini disebabkan masih adanya beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Untuk Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan dan Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P dapat dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan juga dikategorikan Sangat Baik dengan capaian kinerja 100%.
5. Sedangkan untuk Capaian Indikator Kinerja Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target dapat dikategorikan Sangat Rendah dengan realisasi hanya 2,53% dari target 6%, dengan capaian Kinerja hanya 42,17%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:
    a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
    b. Masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen;

c. Belum adanya penerapan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak seperti berupa penyegelan untuk Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selama ini metode yang dilakukan dengan pendekatan persuasif yang dan sanksi yang diberikan juga berupa sanksi administratif yakni dengan mengenakan denda;
d. Personil di Bidang Pengelolaan PAD yang masih kurang memadai baik dari segi kualitas (yang berkompeten) maupun kuantitas. Sementara pengawasan pajak yang ada dibeberapa Kecamatan yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah harus terus dilakukan;
e. Dalam penetapan target PAD, terdapat target pendapatan yang tidak mendasar, seperti :
    1. Target Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp.9.167.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp.423.695.705,00. Sementara data realisasi dua tahun terakhir sebesar Rp.8.078.844.039,62 (termasuk pendapatan dari pengembalian TPTGR Rp 2.114.493.257,34) untuk tahun 2021, dan Rp.371.190.668,00 untuk tahun 2022.
    2. Target Jasa Giro sebesar Rp.1.020.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.393.602.509,00 sementara hal ini tergantung Jasa Giro Kas Daerah di Bank Riau Kepri Syariah.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal diatas menjadi concern tersendiri di BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Kondisi Pegawai BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Klamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	47 Orang
2.	Perempuan	41 Orang
	Total	**88 Orang**

Tabel II.4
Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III	5	1
3.	Eselon IV	9	2
4.	JFT	3	1
5.	Pelaksana	4	12
	Total	**22**	**16**

Tabel II.5
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Penempatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Sekretariat	9	9
2.	Bidang Anggaran	2	1
3.	Bidang Perbendaharaan Daerah	2	4
4.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	2
5.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	4	6
6.	Bidang Akutansi dan Pelaporan	3	3
	Total	**25**	**25**

Dari tabel diatas, kondisi pegawai BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 adalah sejumlah 88 orang, yang terdiri dari 47 orang pegawai laki-laki dan 41 orang pegawai perempuan. Pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 telah

dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2023, BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 1 urusan, 4 program, 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.6
Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPKPD Tahun 2023

No.	Program	No.	Kegiatan	No.	Sub Kegiatan
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah/Kota**	1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Sub Kegiatan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Sub Kegiatan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				3.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1.	Sub Kegiatan – Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		4.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				2.	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4.	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Bacaan dan

					Peraturan Perundang-undangan
				5.	Sub Kegiatan - Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6.	Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah**	1.	Sub Kegiatan - Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan
				2.	Sub Kegiatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah**			3.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8.	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				2.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
				3.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				4.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
				5.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

				6.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
				7.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				8.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				9.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				10.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				11.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
				12.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
				13.	Sub Kegiatan - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		9.	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
				2.	Sub Kegiatan -Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		10.	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	1.	SubKegiatan - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
				2.	Sub Kegiatan - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

				3.	Sub Kegiatan - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
				4.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				5.	Sub Kegiatan - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				6.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
				7.	Sub Kegiatan - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
				8.	Sub Kegiatan - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
				9.	Sub Kegiatan - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		11.	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
				2.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
		12.	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah

			Lingkup Keuangan Daerah		Daerah Bidang Keuangan Daerah
3.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	13.	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Penyusunan Standar Harga
				2.	Sub Kegiatan - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	14.	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	1.	Sub Kegiatan - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
				2.	Sub Kegiatan - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
				4.	Sub Kegiatan - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
				5.	Sub Kegiatan - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Dari sejumlah program/kegiatan diatas, perlu dilakukan pengukuran kinerja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas, yang pada ketercapaian sasaran. Adapun capaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Pengukuran Kinerja Utama BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi	Tingkat Ketercapaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B(65)	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,30)	BB (71,86)	89,49%

2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	2,53%	42,17%

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sebesar Rp.141.966.123.759,00atau 61,81% dari total anggaran sebesar Rp.229.698.130.062,00. Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 dan pencapaian Renstra BPKPD sampai dengan tahun 2023 sebagaimana ditunjukan padatabel berikut:

Tabel II.8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPD dan Pencapaian Renstra BPKPD s/d Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Setiap Tahun						Capaian Setiap Tahun		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah/Kota**	Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	98	97	95
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	90
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	90

5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	90
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	98	97	96
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah	Persentase Silpa terhadap APBD	7,25	7,00	6,50	6,00	5,50	5,00	4,24	0,76	1,93
8.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9.	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	93	90	91
12.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100
III.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan asset daerah	66,67	73,30	80	86,60	93,30	100	66,67	69,70	70,59
13.	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100	97	95	98

IV.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	3,92	3,98	4,02	4,13	4,47	4,62	5,34	-10,92	-2,14
14.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100	96	90	92

Penjelasan dari tabel II.8 diatas adalah terdapat 4 (empat) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana pelaksanaan terhadap Renstra BPKPD tahun 2021-2026. Sebanyak 14 kegiatan memiliki tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra BPKPD tahun 2021-2026. Dari rata-rata realiasi yang telah ditetapkan pada target setiap tahunnya menunjukkan bahwa capaian indikator telah mencapai target, namun tetap ada upaya dalam meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator program dan kegiatan, perlu dilakukan beberapa upaya perbaikan antara lain:

- Peningkatan anggaran: perlu dilakukan pengalokasian anggaran yang memadai untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.
- Pengembangan sumber daya manusia: perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan jabatan dan berkelanjutan.
- Penguatan koordinasi: perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar program dan kegiatan dapat berjalan secara sinergis.

- Peningkatan monitoring dan evaluasi: perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
g. Dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam proses perencanaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selalu mengedepankan pendekatan pembangunan yang reponsif *gender*, dimana pertimbangan terhadap kebutuhan aspirasi baik laki-laki maupun perempuan selalu menjadi khusus. Upaya tersebut dilakukan dengan pelaksanaan verifikasi mendalam terhadap Renja PD di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dilakukan dengan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Pada tahun 2023 BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas telah

melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. **Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program berisi 7 (tujuh) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

2. **Persentase Silpa terhadap APBD**

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program yang berisi 5 (lima) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

3. **Cakupan pengelolaan asset daerah**

   Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program yang berisi 1 (satu) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

4. **Persentase tingkat pertumbuhan PAD**

   Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan program yang berisi 1 (satu) kegiatan yang memiliki capaian indikator sebesar 100%.

Tabel II.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator	Formulasi	Target Renstra PD (%)						Capaian Setiap Tahun		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah											
1	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen APBD dan APBD-P yang harus disusun *100%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah											
3	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan BMD yang disusun tahun berjalan/Jumlah Laporan yang harus disusun *100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pendapatan Asli Daerah											
4	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan *100%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	2,55%	3,40%	2,53%

Dari tabel diatas dapat diketahui bawa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki tiga urusan utama yaitu urusan pengelolaan keuangan daerah, urusan pengelolaan barang milik daerah dan urusan pendapatan asli daerah. Urusan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

transparan dan akuntabel dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Urusan Pengelolaan Keuangan Daerahmeliputi :
  - Penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dan Audited, Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD, Laporan DTH persemester.
  - Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD-P, seperti Dokumen KUA PPAS, Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD, Dokumen Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS, Dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD.

  Capaian indikator pada urusan pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dari:
  - Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen APBD dan APBD-P.
  - Tingkat kesesuaian laporan keuangan dan dokumen APBD dan APBD-P dengan peraturan perundang-undangan.
- Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah

  Urusan Pengelolaan BMD meliputi Penyusunan Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan, seperti Laporan Rekonsiliasi BMD dan Laporan Penyusunan Standar Harga. Capaian indikator pada urusan pengelolaan barang milik daerah dapat diukur dari:
  - Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan rekonsiliasi BMD dan laporan penyusunan standar harga.
  - Tingkat kesesuaian laporan rekonsiliasi BMD dan laporan penyusunan standar harga dengan peraturan perundang-undangan.

- Urusan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

  Urusan pengelolaan PAD meliputi kegiatan pengeloaan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Capaian indikator pada urusan pengelolaan pendapatan asli daerah dapat diukur dari:

  - Jumlah Penerimaan PAD yang meningkat setiap tahunnya.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentan g Pelakasanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan Global Nomor XVI yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua tingkatan. Sasaran globalnya yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan disemua tingkat. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Desa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta;
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas aparatur pemerintah dimana perlunya revolusi mental pada tiap individu aparatur guna peningkatan integritas moral, karakter dan budaya serta terciptanya good governance;
3. Belum optimalnya dalam penggalian sumber pendapatan baru dan pemungutan pendapatan daerah;
4. Belum optimalnya konsistensi mekanisme penyusunan anggaran;
5. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);
6. Perwujudan e-governance dimana dalam pelaksanaannya perlu adanya peningkatan pemahaman akan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan program pemerintah pusat yaitu menciptakan keterbukaan informasi Publik dan pemerintahan

yang transparan dalam segi perencanaan program/kegiatan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan dan isu penting di atas secara tidak langsung akan memberikan dampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional, seperti SPM dan SDG's. Untuk itu optimalisasi terhadap pelaksanaan pogram/kegiatan/sub kegiatan perlu dilakukan guna mempercepat pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjunya penghapusan terhadap pogram/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif perlu dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan pembangunan yang bersifat lintas sektor seperti implementasi Kabupaten layak anak yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak dan penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat memperhatikan suatu Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi gagalnya pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir yang disebut dengan *stunting,* dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas memperhatikan perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan stunting dengan prevelensi stunting tahun 2022 sebesar 6,48% menurun menjadi 5,07% pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan yaitu dalam mengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran sebagai upaya ewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal,

serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan inovatif yang bersifat holistic-tematic, integratif dan spasial untuk diintegrasikan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Organisasi Perangkat Daerah yang wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas membuat suatu inovasi pelaksanaan digitalisasi pengusulan sampai dengan pelaporan perjalanan dinas yang merupakan pengembangan dan bagian dari *Anambas Single Information System (ASIS)* yang terintegrasi dengan sistem absensi harian (Presensi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Sistem Transaksi non tunai melalui *Anambas Single Information System (ASIS),* dengan pembuatan Aplikasi ASIPEDI diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam percepatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan memberikan stimulus dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik salah satunya Digitaliasi Pelayanan Publik.

Agenda kegiatan tahun 2025 akan berupaya lebih optimal pada pelaksanaan inovasi daerah, mengingat pada tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki banyak potensi inovasi daerah yang dapat dikembangkan. Berdasarkan hasil dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas dikategorikan sebagai daerah yang inovatif. Optimalisasi terhadap implementasi inovasi daerah menjadi konsen berbagai pihak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya-upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang

sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
    1. Melaksanakan koordinasi, penyiapan data dan informasi keuangan daerah;
    2. Mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan mengali potensi pendapatan yang ada;
    3. Meningkatkan manajemen dalam pengelolaan barang milik daerah.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur
    1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus/pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
    2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
    3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana dan Prasarana
    1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik;
    2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan;

3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran identifikasi kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel III.10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*13*
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**23.869.169.220**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Dareah**	**100%**	**16.941.191.372**	
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**102.259.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**22.403.700**	
1.	Sub Kegiatan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	75.634.000	Sub Kegiatan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	15.805.200	

	Daerah					Daerah		Daerah			
2.	Sub Kegiatan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.625.000	Sub Kegiatan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.598.500	
2.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**18.565.115.566**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**12.365.052.784**	
3.	Sub Kegiatan - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	17.741.132.308	Sub Kegiatan - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	10.656.541.784	
4.	Sub Kegiatan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	817.920.000	Sub Kegiatan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.699.920.000	

5.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.063.258	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.591.000	
3.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**415.397.040**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**88.000.000**	
6.	Sub Kegiatan – Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	184 Paket	218.603.040	Sub Kegiatan – Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	78.000.000	

7.	Sub Kegiatan - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	196.794.000	Sub Kegiatan - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	
4.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KabupatenKepulauan Anambas**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.062.544.366**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**KabupatenKepulauan Anambas**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**950.991.700**	
8.	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	136.762.118	Sub Kegiatan - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	18.014.500	
9.	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	123.760.248	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	215.723.200	
10.	Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetakan dan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	121.990.000	Sub Kegiatan - Penyediaan Barang Cetakan dan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Paket Barang Cetakan	12 Paket	106.900.000	

	Penggandaan		yang Disediakan			Penggandaan		dan Pengganda an yang Disediakan			
11.	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Doku men	2.400.000	Sub Kegiatan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokume n	15.180.000	
12.	Sub Kegiatan - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapora n	42.000.000	Sub Kegiatan - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.050.000	
13.	Sub Kegiatan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lapora n	631.432.000	Sub Kegiatan - Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	589.124.000	

5.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**798.268.638**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**352.000.000**	
14.	Sub Kegiatan – Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	78.329.900	Sub Kegiatan – Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	
15.	Sub Kegiatan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	494.636.293	Sub Kegiatan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	38.500.000	
16.	Sub Kegiatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	225.302.445	Sub Kegiatan - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	313.500.000	

								Disediakan			
6.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.687.013.110**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.858.122.240**	
17.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.679.600	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.962.116	
18.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	149.675.326	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168.413.100	

19.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.417.658.184	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.580.737.024	
7.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**238.571.500**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**304.630.948**	
20.	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	84.047.500	Sub Kegiatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	98.244.000	
21.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan Peralatan dan	Kabupaten Kepulauan	Jumlah Peralatan dan Mesin	51 Unit	54.430.000	Sub Kegiatan - Pemeliharaa	Kabupaten Kepulauan	Jumlah Peralatan dan Mesin	51 Unit	68.620.000	

	Mesin Lainnya	Anambas	Lainnya yang Dipelihara			n Peralatan dan Mesin Lainnya	Anambas	Lainnya yang Dipelihara			
22.	Sub Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.094.000	Sub Kegiatan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	137.766.948	
II.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Silpa terhadap APBD**	**5,50%**	**151.712.521.623**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Silpa terhadap APBD**	**5,50%**	**105.035.576.741**	
8.	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**100%**	**3.132.225.130**	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**100%**	**3.701.238.400**	
23.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	61.410.860	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	116.530.500	

24.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	50.700.000	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	113.511.000	
25.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	13.800.000	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	56.080.000	
26.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	13.800.000	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	45.080.000	
27.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Terlaksananya Dokumen Hasil Verifikasi DPA SKPD	34 Dokumen	64.351.150	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Terlaksananya Dokumen Hasil Verifikasi DPA SKPD	34 Dokumen	195.807.500	
28.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	54.600.000	Sub Kegiatan - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	116.827.500	

						DPA-SKPD					
29.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	800.900.000	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	826.680.700	
30.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	733.732.000	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	792.355.200	

31.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	757.933.920	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	749.107.000	
32.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	191.459.500	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	198.359.000	
33.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	122.167.500	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	186.843.000	
34.	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	52.736.100	Sub Kegiatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	91.193.000	

35.	Sub Kegiatan - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	214.634.100	Sub Kegiatan - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	40 Orang	212.864.000	
9.	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100%**	**362.641.000**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100%**	**309.738.000**	
36.	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	247.525.000	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	125.410.000	

37.	Sub Kegiatan – Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	115.116.000	Sub Kegiatan – Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	40 Orang	184.328.000	
10.	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100%**	**793.696.560**	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100%**	**960.395.400**	
38.	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan	4 Dokumen	84.658.800	Sub Kegiatan - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan	4 Dokumen	104.216.000	

			Beban					Beban			
39.	Sub Kegiatan - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	414.402.000	Sub Kegiatan - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	456.530.000	
40.	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K	2 Dokumen	187.784.000	Sub Kegiatan - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	2 Dokumen	187.784.000	

			ota			Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		/Kota			
41.	Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	88.090.000	Sub Kegiatan - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	118.329.000	
42.	Sub Kegiatan - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	18.761.760	Sub Kegiatan - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota	102 Orang	93.536.400	
11.	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan**	**100%**	**146.450.997.973**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Penunjang Urusan Kewenangan**	**100%**	**99.297.441.941**	

	Keuangan Daerah		**Keuangan Daerah**			**Keuangan Daerah**		**Pengelolaan Keuangan Daerah**			
43.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000	
44.	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	52 Laporan	144.450.997.973	Sub Kegiatan - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten /Kota	52 Laporan	97.297.441.941	
12.	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100%**	**972.960.960**	**Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**100%**	**766.763.000**	

45.	Sub Kegiatan - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	972.960.960	Sub Kegiatan - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	766.763.000	
III.	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Cakupan pengelolaan asset daerah**	**93,30 %**	**4.744.407.800**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Cakupan pengelolaan asset daerah**	**93,30%**	**2.645.000.000**	
13.	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**4.744.407.800**	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**2.645.000.000**	
46	Sub Kegiatan - Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	766.119.000	Sub Kegiatan - Penyusunan Standar Harga	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	766.119.000	
47	Sub Kegiatan - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	209.108.000	Sub Kegiatan - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	2 Dokumen	209.108.000	

	Daerah					Daerah		Daerah			
48	Sub Kegiatan – Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	780.441.600	Sub Kegiatan – Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	780.441.600	
49	Sub Kegiatan – Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.299.810.600	Sub Kegiatan – Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	393.331.400	
50	Sub Kegiatan – Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	270.282.300	Sub Kegiatan – Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000	
51	Sub Kegiatan - Penilaian Barang Milik Darah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	1 Laporan	559.726.700	Sub Kegiatan - Penilaian Barang Milik Darah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	1 Laporan	200.000.000	

			Daerah					Milik Daerah			
52.	Sub Kegiatan - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	280.607.600	Sub Kegiatan - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	150.000.000	
53.	Sub Kegiatan – Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	578.312.000	Sub Kegiatan – Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000	
IV.	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase tingkat pertumbuhan PAD**	**4,47%**	**692.296.700**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase tingkat pertumbuhan PAD**	**4,47%**	**1.685.928.250**	
14.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100%**	**692.296.700**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kabupaten Kepulauan Anambas**	**Persentase Pengelolaan Pendapata**	**100%**	**1.685.928.250**	

								n Daerah			
54.	Sub Kegiatan - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	85.429.000	Sub Kegiatan - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	565.064.000	
55.	Sub Kegiatan - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	173.950.200	Sub Kegiatan - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	101.826.000	
56.	Sub Kegiatan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	146.086.000	Sub Kegiatan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	207.102.500	

57.	Sub Kegiatan - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	179.007.000	Sub Kegiatan - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	559.875.000	
58.	Sub Kegiatan - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	107.824.500	Sub Kegiatan - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Kepulauan Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	252.060.750	
				Total	**181.018.395.343**				**Total**	**126.307.696.363**	

Jumlah Program : 4 Program

Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 58 Kegiatan

Jumlah Program : 4 Program

Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 58 Kegiatan

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Rencana Kerja (Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Rencana Kerja (Renja) adalah rutinitas perencanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda Pembangunan Nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan Renja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yaitu :

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supemasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Agenda Pembangunan Nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang berkualitas. Untuk

itu disusun Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus didukung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah :

"Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim terdepan yang berdaya saing Majudan Berakhalkul Kharimah (Anambas bermadah 2)".

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu :

"Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi"

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, rancangan tema pembangunan dan prioritas pembangunan yang diusung ialah **"Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan".** Dengan 4 rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana

dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (69)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	A (81,00)
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persentase	100%
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Persentase	Tepat Waktu (100%)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Persentase	100%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Persentase	6%

III.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pembangunan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjalankan satu urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu urusan bidang keuangan, maka pada penyusunan Renja BPKPD tahun 2025 mencakup 4 program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan, yaitu:

Tabel III.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	
		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	*2*	*3*	*4*
5.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.869.169.220**	
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**102.259.000**	**APBD**
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.634.000	APBD
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.025.000	APBD
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.565.115.566**	**APBD**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.741.132.308	APBD
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	817.920.000	APBD

5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.063.258	APBD
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**415.397.040**	**APBD**
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	218.603.040	APBD
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	196.794.000	APBD
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.062.544.366**	**APBD**
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	136.762.118	APBD
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.760.248	APBD
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.990.000	APBD
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	APBD
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.000.000	APBD
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	631.432.000	APBD
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**798.268.638**	**APBD**
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	78.329.900	APBD

5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.636.293	APBD
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.302.445	APBD
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.687.013.110**	**APBD**
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.679.600	APBD
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.675.326	APBD
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.417.658.184	APBD
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**238.571.500**	**APBD**
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.047.500	APBD
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.430.000	APBD
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.094.000	APBD
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**151.712.521.623**	**APBD**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**3.132.225.130**	**APBD**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	61.410.860	APBD

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	50.700.000	APBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	13.800.000	APBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	13.800.000	APBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	64.351.150	APBD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	54.600.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	800.900.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	733.732.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	757.933.920	APBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	191.459.500	APBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	122.167.500	APBD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	52.736.100	APBD
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	214.634.100	APBD

5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**362.641.000**	**APBD**
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	247.525.000	APBD
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	115.116.000	APBD
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**793.696.560**	**APBD**
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	84.658.800	APBD
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	414.402.000	APBD
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	187.784.000	APBD
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	88.090.000	APBD

5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	18.761.760	APBD
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**146.450.997.973**	**APBD**
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000	APBD
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	144.450.997.973	APBD
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**972.960.960**	**APBD**
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	972.960.960	APBD
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**4.744.407.800**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**4.744.407.800**	**APBD**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	766.119.000	APBD
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	209.108.000	APBD
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	780.441.600	APBD
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.299.810.600	APBD
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik	270.282.300	APBD

	Daerah		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Darah	559.726.700	APBD
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	280.607.600	APBD
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	578.312.000	APBD
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**692.296.700**	
5.02.04.2.01	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**692.296.700**	**APBD**
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	85.429.000	APBD
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	173.950.200	APBD
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	146.086.000	APBD
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	179.007.000	APBD
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	107.824.500	APBD
	Jumlah	**181.018.395.343**	

Direncanakan pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan dengan penyebaran lokasi program/kegiatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai fungsi penunjang yaitu urusan bidang keuangan berupaya melakukan Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang ditunjang dengan aspek yaitu :

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)

   Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkomitmen terhadap PUG dengan memberikan proporsi keahlian dan keterampilan perempuan dalam proses mengelola keuangan daerah baik dari tim teknis TAPD, pelaksanaan forum OPD, bimbingan teknis, musrenbang, rapat-rapat teknis dan sejumlah kegiatan lainnya sebagai bentuk penerapan *responsive gender*.

   Meskipun tanpa penganggaran kegiatan khusus, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sejatinya sudah mengakomodir penerapan PUG. Meskipun hasilnya jauh dari kata maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan meningkatkannya ditahun-tahun mendatang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dan Prakiraan Maju tahun anggaran 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**181.018.395.343,00**							**126.332.696.363,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**181.018.395.343,00**							**126.332.696.363,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**181.018.395.343,00**							**126.332.696.363,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah***	**-**			**100 %**	**23.869.169.220,00**						**-**	**16.941.191.372,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan*	-			100 %	102.259.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD	-	22.403.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	75.634.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		15.805.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	26.625.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		6.598.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD*	-			100 %	18.565.115.566,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD	-	12.365.052.784,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	17.741.132.308,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		11.541.069.526,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	817.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		817.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.063.258,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		6.063.258,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu*	-			100 %	415.397.040,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD	-	88.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				184 Paket	218.603.040,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		68.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	196.794.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas*	-			100 %	1.062.544.366,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD	-	950.991.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	136.762.118,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		60.514.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	123.760.248,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		215.723.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	121.990.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		152.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		2.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	46.200.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	631.432.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		478.354.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah*	-			100 %	798.268.638,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD	-	352.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	78.329.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		39.164.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36 Unit	494.636.293,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		87.532.605,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	225.302.445,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Tarempa Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		225.302.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya*	-			100 %	2.687.013.110,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD	-	2.858.112.240,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	119.679.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		119.679.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	149.675.326,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		320.774.456,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.417.658.184,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		2.417.658.184,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	238.571.500,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD	-	304.630.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	84.047.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		118.244.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	54.430.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		86.292.948,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.094.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Lingkup BPKPD		100.094.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Silpa terhadap APBD***	**-**			**5,50 %**	**151.712.521.623,00**						**-**	**105.035.576.741,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan*	-			100 %	3.132.225.130,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders	-	3.701.238.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	61.410.860,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		116.530.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	50.700.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		113.511.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	13.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		56.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	13.800.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		45.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	64.351.150,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		195.807.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	54.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		116.827.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	800.900.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		826.680.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	733.732.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		792.355.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	757.933.920,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		749.107.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	191.459.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		198.359.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	122.167.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		186.843.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	52.736.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		91.193.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	214.634.100,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		212.864.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	-			100 %	362.641.000,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders	-	309.738.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	247.525.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		125.410.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	115.116.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		184.328.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun*	-			100 %	793.696.560,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders	-	960.395.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	84.658.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		104.216.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	414.402.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		456.530.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	187.784.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		187.784.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	88.090.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		118.329.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				102 Orang	18.761.760,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		93.536.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun*	-			100 %	146.450.997.973,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat	-	99.297.441.941,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				52 Laporan	144.450.997.973,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		97.297.441.941,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*	-			100 %	972.960.960,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders	-	766.763.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	972.960.960,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah dan Stakeholders		766.763.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Cakupan pengelolaan asset daerah***	**-**			**93,30 %**	**4.744.407.800,00**						**-**	**2.670.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun*	-			100 %	4.744.407.800,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat	-	2.670.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	766.119.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		766.119.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	209.108.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		209.108.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	780.441.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		754.773.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1.299.810.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	270.282.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	559.726.700,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	280.607.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	578.312.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Perangkat Daerah, Stakeholders dan Masyarakat		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase tingkat pertumbuhan PAD***	**-**			**4,47 %**	**692.296.700,00**						**-**	**1.685.928.250,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang harus tersusun*	-			100 %	692.296.700,00			-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat	-	1.685.928.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	85.429.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		565.064.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	173.950.200,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		101.826.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				9 Unit	146.086.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		207.102.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	179.007.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		559.875.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	107.824.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		252.060.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**181.018.395.343,00**							**126.332.696.363,00**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rancangan Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke-5, periode tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka pencapaian RPJMD tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Selanjutnya, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 akan dijadikan pedoman/acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas serta peran aktif stakeholders dan masyarakat.

Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi yang merupakan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas periode 2021-2026.

Tarempa, 22 Juli 2024

KEPALA BADAN,

RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19701122 200212 1 003